

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan perdagangan dapat memberikan peluang untuk mengekspor barang yang faktor produksinya menggunakan sumber daya berlimpah dan mengimpor barang yang faktor produksinya mahal di dalam negeri. Menurut Mankiw (2006), negara dengan perekonomian terbuka merupakan negara yang aktif melakukan perdagangan antarnegara melalui ekspor dan impor serta berpartisipasi dalam pasar modal dunia. Lalu, menurut Salvatore (2007), salah satu aktivitas perekonomian yang tidak dapat dilepaskan dari perdagangan internasional adalah aktivitas aliran modal, baik yang sifatnya masuk maupun keluar, dari suatu negara.

Perdagangan internasional sangat berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara karena perekonomian dunia semakin terkait satu sama lain (Todaro & Smith, 2006). Aktivitas perdagangan internasional juga menghadapi berbagai tantangan dan risiko akibat persaingan antarnegara meski banyak negara terikat perjanjian perdagangan (Anshari, Khila & Permata, 2017). Jika produksi dalam negeri lebih mahal, maka negara dapat melakukan impor dari negara lain, sehingga dapat menekan biaya produksi dalam negeri. Ketidakmampuan negara dalam menjaga perekonomian akan membawa dampak ketidakstabilan ekonomi makro suatu negara. Tabel 1-1 menunjukkan

perkembangan keterbukaan perdagangan di lima negara *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) tahun 2015-2020.

Tabel 1-1
Keterbukaan Perdagangan Lima Negara APEC Tahun 2015-2020 (Persen)

Tahun	Indonesia	Malaysia	Singapura	Selandia Baru	Australia
2015	41,937	131,370	329,471	54,821	41,625
2016	39,117	127,501	318,748	54,617	41,697
2017	40,390	131,817	327,544	55,554	42,951
2018	41,966	127,893	340,535	55,657	44,065
2019	38,299	120,397	336,613	54,986	44,040
2020	34,759	116,555	335,912	44,942	41,974

Sumber: *World Bank* (diolah)

Berdasarkan Tabel 1-1, terlihat bahwa Singapura adalah negara dengan keterbukaan perdagangan tertinggi di antara anggota APEC, sedangkan negara dengan keterbukaan perdagangan paling rendah adalah Indonesia. Hal ini menjadi penting dan perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk menaikkan nilai keterbukaan dengan mengejar ketertinggalan impor dan terutama ekspor produk-produk yang menjadi unggulan Indonesia untuk meningkatkan PDB.

Salah satu faktor yang berkaitan erat dengan keterbukaan perdagangan adalah angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan faktor produksi yang penting dan harus diperhatikan karena merupakan pelaku utama dari kegiatan produksi. Negara perlu mendorong para pekerjanya agar bisa bekerja lebih produktif dalam mempercepat kegiatan ekonomi, sehingga semakin banyak produk yang dapat diekspor (Doni & Izamuddin, 2018). Semakin banyak angkatan kerja di suatu negara, secara teori, pertumbuhan ekonomi negara tersebut akan meningkat. Di lima negara anggota APEC, khususnya, hal ini diduga karena sebagian besar

penduduk berada pada usia produktif, sehingga kelima negara tersebut dapat memanfaatkan penduduk sebagai pekerja produktif.

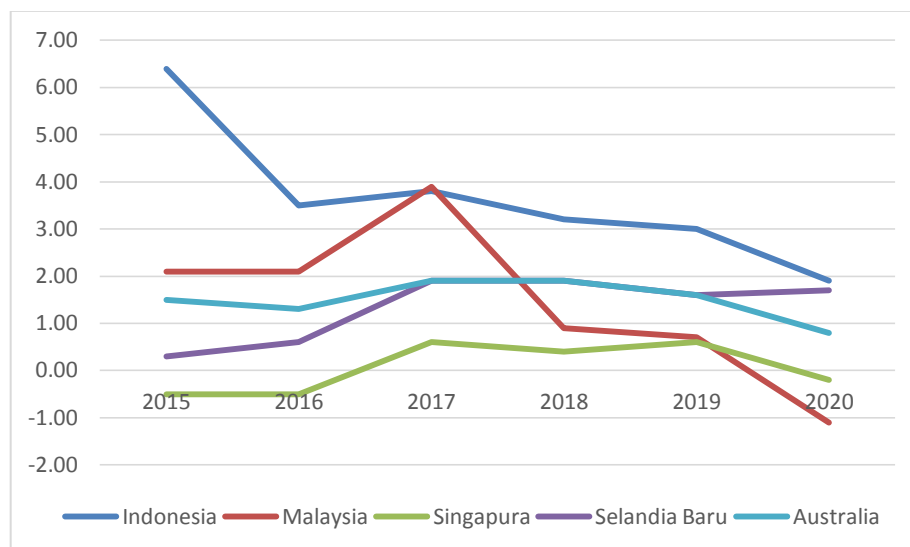
Tabel 1-2
Angkatan Kerja Lima Negara APEC Tahun 2015-2020 (Jiwa)

Tahun	Indonesia	Malaysia	Singapura	Selandia Baru	Australia
2015	124.657.269	14.617.015	3.451.804	2.520.970	12.585.538
2016	125.958.781	14.858.273	3.496.341	2.620.842	12.742.051
2017	129.204.841	15.154.996	3.497.085	2.708.657	12.988.276
2018	132.587.588	15.523.126	3.493.603	2.756.619	13.253.656
2019	135.802.879	15.780.716	3.525.665	2.787.494	13.500.080
2020	134.616.083	15.904.215	3.472.519	2.848.217	13.452.598

Sumber: *World Bank*

Tabel 1-2 menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja di lima negara APEC cenderung meningkat. Banyaknya angkatan kerja secara langsung akan meningkatkan persaingan dalam mencari pekerjaan, dan kualifikasi dari perusahaan atau industri juga menjadi semakin ketat. Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan menyatakan penyerapan tenaga kerja sektor perdagangan dan sektor jasa merupakan sinyal positif terhadap kondisi ekonomi yang lebih baik. Jumlah penduduk bekerja hampir mengalami kenaikan di semua sektor seperti transportasi, pergudangan, dan komunikasi (Sukardi, 2016).

Selain angkatan kerja, faktor lain yang juga memengaruhi keterbukaan perdagangan adalah inflasi. Menurut Rofii & Ardyan (2017), inflasi merupakan salah satu tolok ukur perekonomian suatu negara karena inflasi berkaitan dengan daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi makro. Jika terjadi inflasi di suatu negara, maka produk dalam negeri menjadi lebih mahal, sehingga masyarakat lebih tertarik membeli barang impor yang lebih murah.



Grafik 1-1
Inflasi Lima Negara APEC Tahun 2015-2020 (Persen)

Sumber: *World Bank*

Grafik 1-1 menunjukkan bahwa inflasi pada lima negara APEC tahun 2015 sampai 2020 mengalami fluktuasi, dengan Indonesia sebagai negara dengan tingkat inflasi tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian moneter di Indonesia kurang berjalan optimal. Terjadi inflasi memicu pertumbuhan impor lebih cepat berkembang dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor, karena inflasi menyebabkan harga-harga di dalam negeri lebih mahal dari harga-harga di luar negeri. Oleh sebab itu, inflasi cenderung menambah impor dan menyebabkan permintaan mata uang asing bertambah (Sukirno, 2002).

Faktor selanjutnya yang juga dapat memengaruhi keterbukaan perdagangan adalah kurs atau nilai tukar. Nilai tukar memiliki peran penting dalam perdagangan internasional, karena perubahan nilai tukar yang tidak menentu akan memengaruhi perdagangan internasional dan kinerja perekonomian suatu negara. Hal ini disebabkan karena kurs berpengaruh besar pada neraca transaksi berjalan maupun variabel ekonomi makro lain. Selain itu, kurs per US\$

memungkinkan untuk membandingkan harga barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dengan harga barang atau jasa dari negara lain (Krugman & Obstfeld, 2005).

Tabel 1-3
Kurs Lima Negara APEC Tahun 2015-2020 (Per US\$)

Tahun	Indonesia	Malaysia	Singapura	Selandia Baru	Australia
2015	13389,41	3,91	1,37	1,43	1,33
2016	13308,32	4,15	1,38	1,43	1,34
2017	13380,83	4,30	1,38	1,41	1,30
2018	14236,94	4,03	1,35	1,44	1,34
2019	14147,67	4,14	1,36	1,52	1,44
2020	14582,20	4,20	1,38	1,54	1,45

Sumber: *World Bank*

Berdasarkan Tabel 1-3, terlihat bahwa kurs terlemah di lima negara APEC adalah kurs Indonesia, sedangkan yang terkuat adalah kurs Singapura. Lemahnya kurs menyebabkan harga kebutuhan yang komponennya impor akan melonjak mahal karena transaksinya menggunakan dollar Amerika Serikat (US\$). Akibatnya, harga barang maupun jasa mengalami kenaikan dan menjadi tidak terkendali, dan para pedagang akan kesulitan merencanakan usahanya, terutama untuk mereka yang mengimpor bahan baku dari luar negeri atau menjual barangnya ke pasar internasional.

Faktor selanjutnya yang memengaruhi keterbukaan perdagangan yaitu pertumbuhan jumlah uang beredar. Kegiatan perekonomian suatu negara tidak pernah terlepas dari kegiatan pembayaran uang. Peningkatan jumlah uang beredar di tangan masyarakat akan meningkatkan daya beli masyarakat, baik terhadap produk dalam negeri maupun produk luar negeri (Muchlas & Agus, 2015). Tabel

1-4 menunjukkan pertumbuhan jumlah uang beredar di lima negara APEC tahun 2015-2020.

Tabel 1-4
Pertumbuhan Jumlah Uang Beredar Lima Negara APEC Tahun 2015-2020
(Persen)

Tahun	Indonesia	Malaysia	Singapura	Selandia Baru	Australia
2015	9,00	3,00	1,50	9,90	6,00
2016	10,00	2,80	8,00	7,70	6,70
2017	8,30	4,60	3,20	7,30	4,50
2018	6,30	7,70	3,90	6,40	2,40
2019	6,50	2,70	5,00	4,70	14,10
2020	12,40	4,90	13,20	12,20	13,70

Sumber: *World bank*

Tabel 1-4 menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah uang beredar di lima negara APEC tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi. Jumlah uang beredar di Indonesia dan Singapura pada tahun 2018-2020 terus mengalami kenaikan, yang diantaranya disebabkan oleh kenaikan harga barang, permintaan barang, tingkat suku bunga, struktur perekonomian negara, lingkungan atau pengawasan, serta pendapatan masyarakat. Pertumbuhan jumlah uang beredar yang tak terkendali dapat menimbulkan berbagai pengaruh buruk bagi perekonomian secara keseluruhan. Jumlah uang beredar yang berlebihan dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi, sedangkan jumlah uang beredar yang rendah akan mengakibatkan penurunan ekonomi, sehingga hal ini berdampak pada kemakmuran masyarakat (Rahmatika, 2017).

B. Rumusan Masalah

Perdagangan internasional merupakan salah satu komponen utama dalam pendapatan nasional karena mencakup kegiatan ekspor dan impor. Keterbukaan

perdagangan yang tinggi mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi di negara tersebut berjalan dengan baik. Lima negara APEC dalam penelitian ini (Indonesia, Malaysia, Singapura, Selandia Baru, dan Australia) memiliki kedekatan geografis yang mempermudah jalur distribusi perdagangan internasional. Selain itu, hubungan perdagangan internasional Indonesia dengan ke empat negara lain dari penelitian ini cukup tinggi sehingga penelitian ini perlu dilakukan.

Berdasarkan latar belakang, diketahui bahwa nilai keterbukaan perdagangan di lima negara APEC berfluktuasi. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi keterbukaan perdagangan adalah jumlah angkatan kerja yang merupakan modal bagi terlaksananya kegiatan perekonomian, tingkat inflasi, kurs, dan pertumbuhan jumlah uang beredar.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan coba dijawab oleh penelitian ini adalah bagaimana pengaruh angkatan kerja, inflasi, kurs, dan pertumbuhan jumlah uang beredar terhadap keterbukaan perdagangan di lima negara APEC tahun 2015-2020.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah mengestimasi arah dan besarnya pengaruh angkatan kerja, inflasi, kurs, dan pertumbuhan jumlah uang beredar terhadap keterbukaan perdagangan di lima negara APEC tahun 2015-2020 dengan menggunakan regresi data panel.

D. Manfaat Penelitian

Bagi otoritas pembuat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan informasi yang berguna bagi semua pihak yang memerlukan,

sebagai masukan bagi pembuat kebijakan di negara-negara akan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keterbukaan perdagangan di lima negara APEC. Bagi para peneliti dan akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat membuktikan secara empiris pengaruh angkatan kerja, inflasi, kurs, dan pertumbuhan jumlah uang beredar terhadap keterbukaan perdagangan di lima negara APEC.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan ini yang memuat uraian secara garis besar isi dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung masalah yang sedang diteliti, penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan definisi operasional variabel dependen dan variabel independen, jenis dan sumber data, serta alat analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil dari analisis data, interpretasi hasil regresi, dan interpretasi ekonomi.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran guna perbaikan dan referensi penelitian selanjutnya dalam pembahasan ruang lingkup yang sama.